



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 59 /B.V/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 900/1821/III.12.1/ 2012 tanggal 6 November 2012 perihal Usulan KPA, PPK, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara PNBP APBN Dekonsentrasi (DK) TA 2013;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Menperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/ 2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/ 2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

S.JACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERPENGARUH MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKUAN ANGGARAN	MATA PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT YANG MEMBUAT MINGGU DAN KOMITMEN	BENDAHARA PENGELUARAN SPM	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN		
				1	2						
				3	4	5	6	7	8	9	
1.	018.03.3.129065 /2013 05-12-2012	018 03 12 9065	-	12.579.554.000,-	Ir. Liana Rekyanti Penitipa Utama Muda(IW/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Liana Rekyanti Penitipa Utama Muda(IW/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Flo Djoko Purwatiningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660310 199203 2 004	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Srimatun Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680309 199203 2 003	Hernanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
1.1	018.03.3.129065 /2013 05-12-2012	018.03.06. 1761	325.000.000,-	Ir. Liana Rekyanti Penitipa Utama Muda(IW/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Eko Dyah Purwaningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660810 199203 2 004	Dr. Suntardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Srimatun Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680309 199203 2 003	Hernanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.		
1.1.2	018.03.3.129065 /2013 05-12-2012	018.03.06. 1762	1.551.600.000,-	Ir. Liana Rekyanti Penitipa Utama Muda(IW/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Eko Dyah Purwaningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660810 199203 2 004	Dr. Suntardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Srimatun Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680309 199203 2 003	Hernanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 59/B/WILK/3013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1763	Pengelolaan Sistem Peneridikan Benih Tanaman Pangan	5.30.000.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Iko Dyah Purwaningsih Penata Tk. I (III/d)	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d)	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Hernanto Penata Muda (III/a)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
1.1.4 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1763	Pengelolaan Sistem Peneridikan Benih Tanaman Pangan	1.816.000.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Enggar Basuki Widodo Penata Tk. I (IV/b)	Fauzi SP, MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19611014 198703 1 002	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Reamento Penata Muda (III/a)	UPID Bala Induk Tanaman Serikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-IPH).
1.1.5 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1763	Pengelolaan Sistem Peneridikan Benih Tanaman Pangan	619.500.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. I Andi Rekyanti Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Reamento Penata Muda (III/a)	UPID Bala Induk Tanaman Serikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-IPH).
1.1.6 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1764	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPt dan DPI	5.674.650.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Rozali Penata Tk. I (IV/b)	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Hernanto Penata Muda (III/a)	UPID Bala Induk Tanaman Serikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-IPH).
1.1.7 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1764	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPt dan DPI	75.000.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Eko Dyah Penata Tk. I (III/d)	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Hernanto Penata Muda (III/a)	UPID Bala Induk Tanaman Serikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-IPH).
1.1.8 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1765	Penanganan Pasea Paten Tanaman Pangan	910.000.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Eko Dyah Penata Tk. I (III/d)	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Hernanto Penata Muda (III/a)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
1.1.9 /2013 05-12-2012	018.03.3.129065	018.03.06. 1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Dijen Tanaman Pangan	1.977.804.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009	Ir. Eko Dyah Penata Tk. I (III/d)	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Sunitan Penata Muda Tk. I (III/b)	Hernanto Penata Muda (III/a)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2	018.04.3.129000	018 04 12 129000	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	4.393.261.000,-	Ir. I Andi Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1769	Peningkatan Produkksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	450.000.000,-	Ir. Liana Reksanti NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Endita NIP. 19650625 199103 2 005	Ir. Endita Syarif Penata Tk. I (IV/b) NIP. 198007 1 001 199203 2 008	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198610 1 002	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	
2.1.2.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1771	Peningkatan Produkksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	447.300.000,-	Ir. Liana Reksanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Kusumawati. MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650625 199103 2 005	Ir. Emilia Kusumawati. MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650625 199103 2 005	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/a) NIP. 19680801 199203 2 008	Ely Suarni Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2.1.3.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	334.337.000,-	Ir. Liana Reksanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Kusumawati. MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650625 199103 2 005	Ir. Emilia Kusumawati. MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650625 199103 2 005	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Hermanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2.1.4.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	376.988.000,-	Ir. Liana Reksanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Fauz, SP, MM Penata Tk. I (IV/d) NIP. 19611014 198703 1 002	Drs. Sunardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Hermanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2.1.5.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	701.548.000,-	Ir. Liana Reksanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Finggar Basuki Widodo Penata Tk. I (IV/b) NIP. 19571024 198303 1 007	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Hermanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	UPTD Baitul Tiduk Tanaman Pangan dan Hortikultura. (B3T/TP1)	
2.1.6.	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	1.483.088.000,-	Ir. Liana Reksanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Royali Penata Tk. I (IV/b) NIP. 19580603 198603 1 005	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (II/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Hermanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	UPTD Baitul Tiduk Tanaman Pangan dan Hortikultura. (B3T/TP1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2.1.7	018.04.3.129000 /2013 05-12-2012	018.04.07. 1774	Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	600.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Emilia Kusumawati, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650625 199103 2 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Ely Suarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19680801 199203 2 008	Hermanto Penata Muda (III/a) NIP. 19590102 198610 1 002	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3.	018.07.4.129002 /2013 05-12-2012	018 07 12 129002	-	7.525.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	-	-	-	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3.1	018.07.4.129002 /2013 05-12-2012	018.07.10.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	7.525.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Herlin Retnowati Pembina (IV/a) NIP. 19640628 198803 2 005	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Nafrizal Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19611103 198503 1 009	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3.1.1	018.07.4.129002 /2013 05-12-2012	018.07.10. 1789	Pengembangan Pemasaran Domistik	225.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Herlin Retnowati Pembina (IV/a) NIP. 19640628 198803 2 005	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Nafrizal Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19611103 198503 1 009	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3.1.2	018.07.4.129002 /2013 05-12-2012	018.07.10. 1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	7.300.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Herlin Retnowati Pembina (IV/a) NIP. 19640628 198803 2 005	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Nafrizal Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19611103 198503 1 009	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.	018.08.3.129003 05-12-2013	018 08 12 129003	-	2.926.890.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	-	-	-	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.1.	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.926.890.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 1794	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	30.600.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4.1.2	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	832.450.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.1.3	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	100.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.1.4	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	439.400.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.1.5	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 3993	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	1.474.440.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4.1.6	018.08.3.129003 05-12-2013	018.08.11. 3994	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	50.000.000,-	Ir. Lana Rekyanti Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590107 198303 2 009 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. Indriatmoko Dhianto Pembina (IV/a) NIP. 19640716 199103 1 008	Drs. Sumardi Syarif Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630913 198907 1 001	Zainuddin, K Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19580115 199203 1 004	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

S.JACHROEDIN Z.P.